

100
302 01 02
100
9
6

SKRIPSI

Rr. WERDININGSIH

**GERAKAN ACEH MERDEKA DALAM
PERSPEKTIF SUBYEK HUKUM
INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

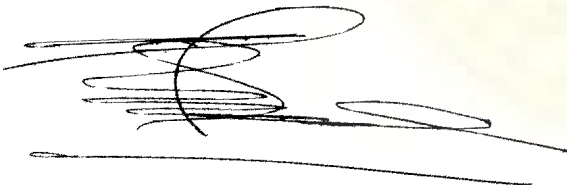
**GERAKAN ACEH MERDEKA DALAM
PERSPEKTIF SUBYEK HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

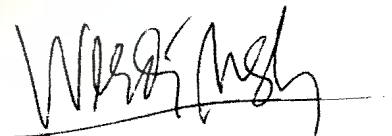
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Eman Ramelan, S.H., M.S.
NIP. 131 286 715



Rr. Werdiningsih
NIM. 039814629

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Kedudukan pemberontak dalam hukum internasional diakui sebagai subyek hukum internasional. Subyek hukum yang demikian disebut *insurgency* dan *belligerency*. Dari dua subyek hukum internasional ini terdapat perbedaan hak dan kewajiban serta perlakuannya dalam hukum internasional. *Belligerency* mendapat perlindungan hukum menurut protokol II tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949 sedangkan *insurgency* tidak diberikan pengaturan yang baku dalam suatu konvensi internasional. Hal ini dikarenakan masalah pemberontakan adalah masalah dalam negeri suatu negara sehingga negara tersebut mempunyai kebebasan untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap peristiwa pemberontakan itu. Negara lain harus menghormati kedaulatan negara tersebut dengan tidak melakukan tindakan intervensi.
2. GAM merupakan suatu *insurgency* yang berarti konsekuensinya GAM tidak dapat dianggap sebagai pihak yang sah dalam hukum perang internasional dan tidak mendapatkan perlindungan menurut protokol II tahun 1977 pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

4.2. SARAN

1. Pemberontak sebagai subyek hukum internasional yang diakui dalam dua bentuk tersebut tidak ada jaminan hukum yang tegas dalam hukum internasional. Perlindungan itu hanya diberikan kepada kaum *belligerency* saja sehingga diperlukan adanya suatu konvensi yang mengatur hak dan kewajiban kaum *insurgency*. Hal yang demikian ini mungkin akan berbenturan dengan adanya kedaulatan negara untuk menerapkan hukum nasionalnya, namun setidaknya konvensi itu akan menjadi pelengkap dalam menegakkan keadilan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi berat seperti yang terjadi di Aceh. Perlindungan itu juga dimaksudkan karena tidak semua tindakan dari kaum *insurgency* itu mempunyai tujuan yang tidak baik. Kadang tujuan suatu pemberontakan melakukan aksinya merupakan suatu tujuan yang mulia misalnya untuk memberontak terhadap penguasa yang korup dan otoriter.
2. GAM ada karena ketidakadilan antara pusat dengan Aceh dibidang sosio kultural, ekonomi, politik, dan demokrasi yang telah eksis lebih dari 24 tahun. Lamanya waktu itu sesungguhnya menunjukkan kegagalan GAM dalam mewujudkan cita-citanya dan meningkatnya potensi penyelesaian secara kompromistik dan humanis, oleh karena itu disarankan kepada pemerintah pusat agar tidak hanya menebar janji-janji tetapi segera mengimplementasikannya menjadi suatu kenyataan. Pelaksanaan jeda kemanusiaan, operasi militer, operasi kepolisian tidak efektif dalam

penyelesaian masalah Aceh. Sebaiknya pemerintah pusat dalam menghadapi masalah Aceh ini melakukan penyelesaian konflik secara humanis dengan mengedepankan solusi yang terbaik.

